

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi dalam Perspektif *Collaborative Governance* Di Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan UMKM pada masa pandemi dinilai kurang optimal. Pemberdayaan yang telah diimplementasikan sebagaimana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan UMKM pada masa pandemi COVID-19. Pemberdayaan UMKM juga masih kurang merata. Sehingga secara garis besar pemberdayaan UMKM pada masa pandemi dalam perspektif *collaborative governance* di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan belum optimal. Adapun fase-fase pemberdayaan yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pemberdayaan UMKM dengan rincian sebagai berikut:

1. Fase Inisial, pemerintah berperan penuh dalam memberdayakan pelaku UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan, sehingga pelaku UMKM memiliki keberdayaan untuk mengembangkan UMKM di masa pandemi. Akan tetapi kenyataannya, pelaku UMKM di kabupaten Banyumas masih banyak yang tidak berdaya untuk mengembangkan UMKM di masa pandemi. Dikarenakan dalam fase inisial belum optimal, pemerintah belum mengoptimalkan program pemberdayaan UMKM.

Jumlah pelatihan yang diadakan di kabupaten Banyumas tahun 2021 awal pandemi COVID-19 yang masih dikatakan sedikit, sedangkan pada tahun 2022 masa pemulihan pandemi COVID 19 dengan menekankan pemulihan ekonomi juga jumlah pelatihan meningkat, tetapi dengan jumlah pelatihan meningkat program pelatihan masih belum menyeluruh kesemua bidang UMKM. Tujuan pelatihan pemberdayaan UMKM pada masa pandemi COVID-19 masih belum tersampaikan dengan optimal, dalam *Collaborative Governance* sudah cukup bagus untuk mengembangkan UMKM. Proses penyuluhan dalam penyebaran informasi masih kurang menyeluruh ke seluruh pelaku UMKM, padahal sudah dilakukan *Collaborative Governance* dengan pihak ketiga yaitu Aspikmas.

2. Fase Partisipatoris, pelaku UMKM bisa ikut terlibat dalam setiap program pemberdayaan UMKM yang ada dan juga berantusias dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi supaya antara pihak pemerintah dan pelaku UMKM terjalin dengan baik. Akan tetapi sejauh ini, pelaku UMKM di kabupaten Banyumas tidak berhasil menyebarkan informasi mengenai program pemberdayaan UMKM secara menyeluruh ke pelaku UMKM. Padahal pemerintah telah melakukan cara untuk semuanya ikut terlibat dalam keseluruhan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan cara berkolaborasi dengan Aspikmas. Semua pelaku UMKM belum sepenuhnya bergabung ke Aspikmas, jadi yang ikut terlibat aktif dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah ataupun Aspikmas hanya pelaku UMKM

yang bergabung ke organisasi Aspikmas meskipun apabila mereka ingin terlibat harus menunggu perintah terlebih dahulu. Antusias pelaku UMKM sangat tinggi dalam memberikan saran program tetapi ruang mereka dalam memberikan saran masih sempit hanya yang berantusias yang bergabung ke Aspikmas pelaku UMKM yang tidak bergabung mereka ruang untuk ikut terlibat aktif sempit. Padahal mereka sangat berantusias, seharusnya seluruh pelaku UMKM diberikan ruang yang sangat luas dalam proses perencanaan untuk memberikan saran untuk program pemberdayaan selanjutnya.

3. Fase Emansipatoris, sudah semuanya yang berperan yaitu pelaku UMKM dimana pemerintah berperan sebagai pendukung dari setiap gerak pelaku UMKM berkembang. Akan tetapi kenyataannya, pemerintah tidak tercapai menjalankan perannya karena belum sepenuhnya pelaku UMKM di kabupaten Banyumas menemukan kemampuannya untuk memberdayakan usahanya untuk mengembangkan UMKM-nya di masa pandemi COVID-19. Dilihat dari asset, volume usaha, dan sisa hasil usaha mengalami penurunan dan banyak usaha yang pada masa pandemi COVID-19 memilih untuk berhenti sejenak.

B. Implikasi

Berdasarkan pada kesimpulan terkait Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi dalam Perspektif *Collaborative Governance* Di Kabupaten Banyumas, maka dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut

1. Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai penanggungjawab dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyumas perlu perbaikan secara maksimal dalam proses pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan agar berjalan dengan optimal sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Serta perbanyak ataupun mengadakan secara rutin kegiatan pelatihan dalam hal pemberdayaan UMKM dengan sasaran kegiatan yang menyeluruh ke semua bidang UMKM sehingga kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara merata ke semua bidang UMKM.
2. Keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam proses pemberdayaan UMKM terutama dalam proses perencanaan program pemberdayaan UMKM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan UMKM selanjutnya. Maka pemerintah kabupaten Banyumas harus membuka ruang yang sangat luas terhadap pelaku UMKM semua bidang UMKM tanpa menutup ruang kepada UMKM yang tidak bergabung di AspiKmas agar bisa ikut terlibat aktif dalam proses pemberdayaan UMKM. Pemerintah juga lebih memperhatikan keterlibatan peserta pelaku UMKM mana yang perlu mengikuti program pemberdayaan UMKM dalam menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengembangan UMKM di masa pandemi.
3. Pelaku UMKM seharusnya setelah program pemberdayaan UMKM, seperti dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait

pengembangan usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing bahkan pada masa pandemi harus bisa lebih inovatif dan mampu bergelut dengan teknologi. Hal tersebut memberikan peluang supaya asset, volume usaha, dan sisa hasil usaha mengalami kenaikan.

